

SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA STABIL DAN DIDUKUNG KINERJA INTERMEDIASI YANG SEMAKIN KUAT

Sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global



Tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk Tiongkok



Tekanan inflasi AS kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) sebanyak dua kali di akhir tahun 2024



Otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024



Pemerintah Tiongkok menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif dan kebijakan akomodatif Bank sentral dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti



Pemerintah dan Bank Sentral India melakukan *buyback* surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan *yield*

Domestik



Pertumbuhan ekonomi Q1 2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) sejalan dengan periode Pemilu, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran THR PNS/Pensiunan, serta periode Ramadhan/lebaran



Indikator perekonomian di awal Q2 2024 menunjukkan moderasi pertumbuhan khususnya data-data terkait permintaan masyarakat dan kinerja sektor yang terkait komoditas



PASAR MODAL



IHSG
6.970,74
Mei'24 -4,15% ytd



Jumlah Investor
12,94 Juta
Mei'24

Nilai Penghimpunan Dana Mei'24

Rp **86,92 T**

NAB Reksa Dana Mei'24

Rp **482,23 T**

Emiten Baru (IPO) Mei'24

18

Securities Crowdfunding (SCF)

Mei 2024



17
penyelenggara berizin OJK

546
penerbit

Rp 1,13 Triliun
total dana yang dihimpun

174.873
pemodal

Perdagangan Karbon

26 September 2023 s.d Mei 2024



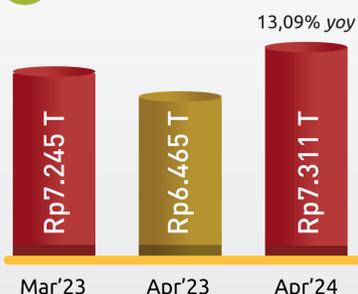
Rp36,77 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

608.427 tCO2e
Volume Unit

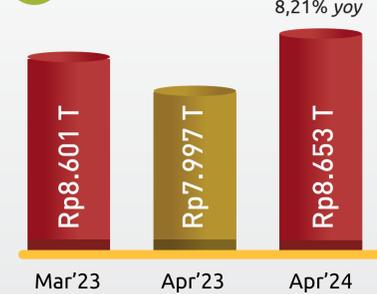
PERBANKAN



Kredit



Dana Pihak Ketiga



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



Kredit Konsumsi



CAR
25,99%
Apr'24



AL/NCD
113,94%
Apr'24



AL/DPK
25,62%
Apr'24



NIM
4,56%
Apr'24



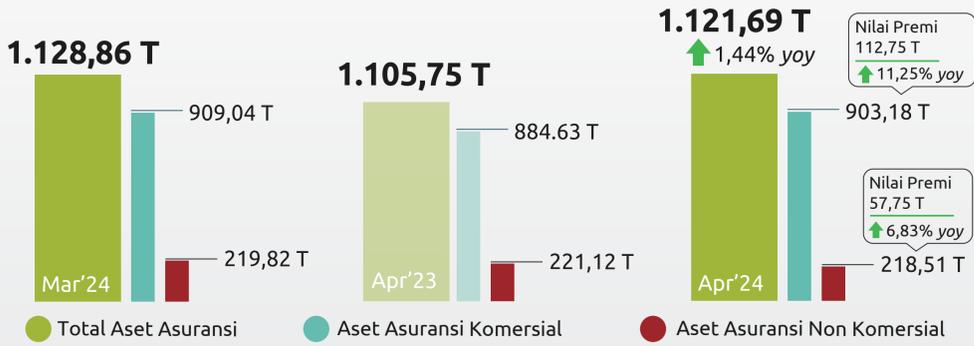
NPL Gross
2,33%
Apr'24



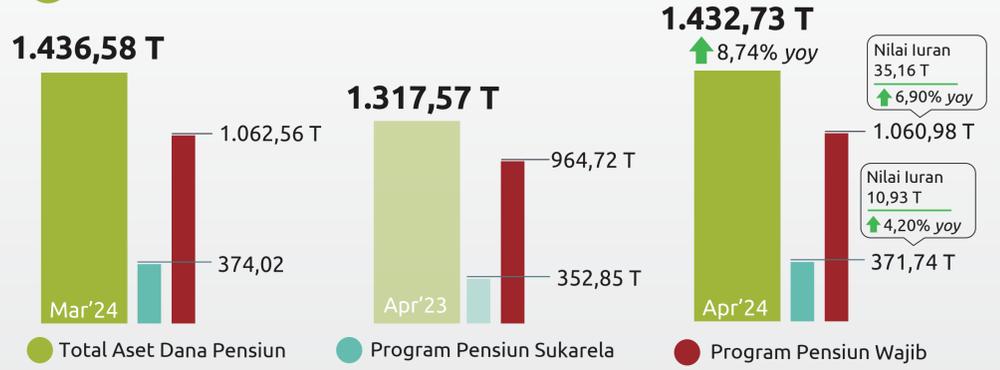
RoA
2,51%
Apr'24

PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN (PPDP)

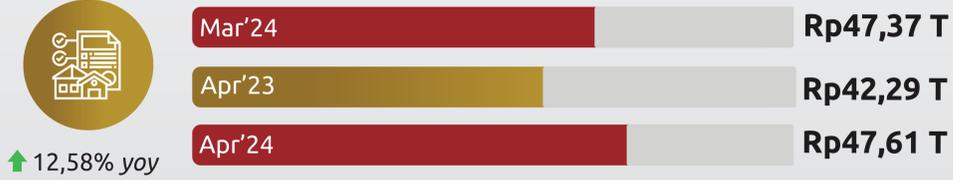
Aset Asuransi (Rp)



Aset Dana Pensiun (Rp)

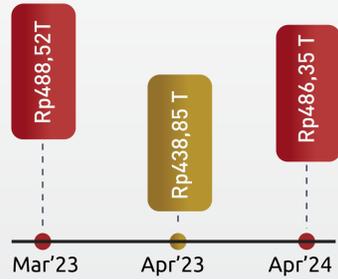


Aset Perusahaan Penjaminan

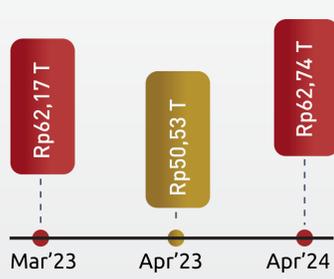


LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

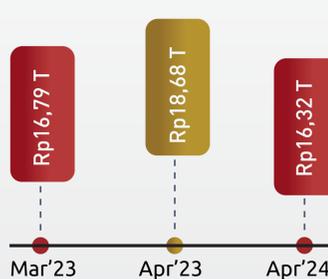
Piutang Pembiayaan (Rp)



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



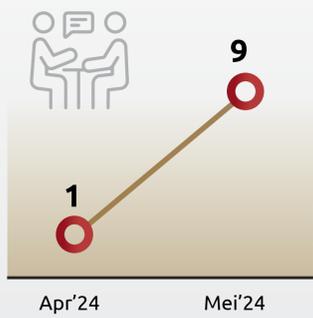
Pembiayaan Modal Ventura (Rp)



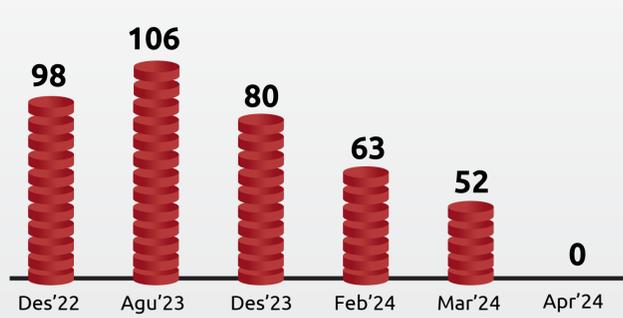
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Regulatory Sandbox

Pengajuan Konsultasi

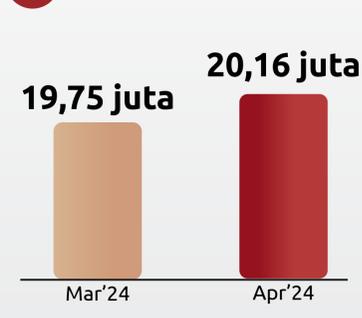


Tren Jumlah Penyelenggara ITSJK di sandbox

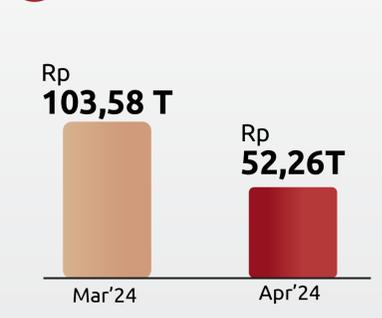


Aset Kripto

Jumlah Investor



Transaksi Kripto

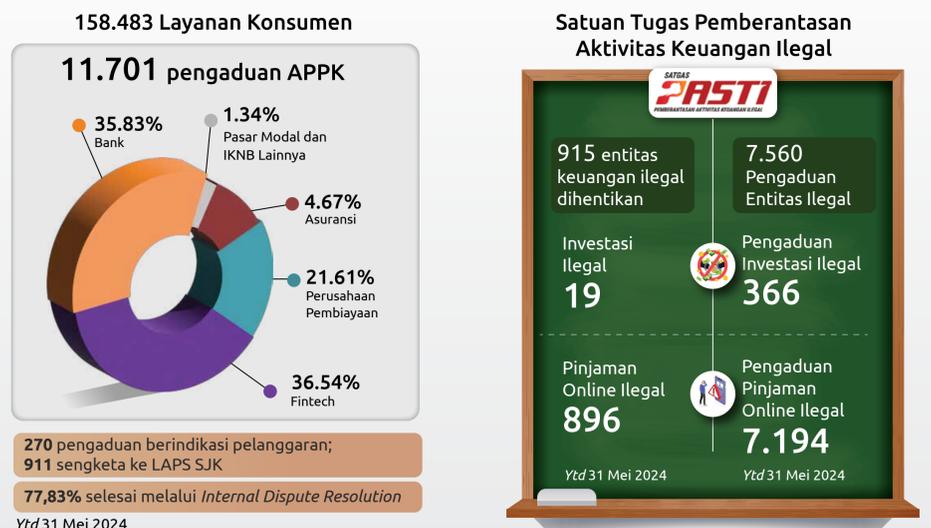


PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan edukasi keuangan



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



Penegakan Hukum Ketentuan Pelindungan Konsumen berupa Sanksi Peringatan Tertulis, Sanksi Denda, dan Surat Perintah serta penggantian kerugian konsumen oleh PUJK.

ARAH KEBIJAKAN OJK



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Mendukung pembentukan Satuan Tugas Judi *Online* yang dipimpin oleh Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkum). Beberapa langkah penanganan judi online yang telah dilakukan OJK:
 - Melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu *Customer Identification File* (CIF) yang sama;
 - Menginstruksikan perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan *Enhance Due Dilligence* (EDD) termasuk tracing dan profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi *online*;
 - Memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi *online* ke dalam Sistem Informasi Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP), sehingga dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi *online* dan mengatasi *asymmetric information* di sektor jasa keuangan;
 - Upaya preventif di sisi aspek edukasi masyarakat terkait judi *online* dan meminta industri jasa keuangan secara proaktif melakukan identifikasi dan verifikasi atas rekening dengan transaksi yang mencurigakan termasuk aktivitas judi *online*.
- Memonitor manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tetap dijaga baik oleh industri perbankan. Perbankan telah melakukan langkah antisipatif melalui pembentukan pencadangan yang memadai, termasuk untuk penghapusbukuan dalam rangka menata kembali neraca bank. Dengan langkah antisipasi tersebut, risiko kredit kecil dan mikro diperkirakan akan tetap berada pada level yang terjaga dan kinerja perbankan mampu tumbuh secara berkelanjutan.



Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan Infrastruktur Pasar

- Meluncurkan *Roadmap* Penguatan dan Pengembangan BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027 sebagai landasan kebijakan untuk memperkuat dan mengembangkan industri BPR dan BPRS sejalan dengan UU P2SK.
- Dalam proses finalisasi RPOJK Tata Kelola BPR/BPRS sebagai upaya untuk mendorong pembenahan dan penguatan penerapan tata kelola.
- Dalam proses finalisasi RPOJK tentang Penerbitan dan Laporan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
- Melakukan kerja sama dengan *General Insurance Rating Organization of Japan* (GIROJ) dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait penetapan tarif premi asuransi untuk mempersiapkan program asuransi *third party liability* untuk kecelakaan lalu lintas sebagaimana diamanatkan UU P2SK.
- Bekerja sama dengan OECD *Clean Energy Finance and Investment Mobilisation* (CEFIM) *Programme* akan menyelenggarakan *Public Private Dialogue: Unlocking Financing for Energy Efficiency in Indonesia*, sebagai salah satu upaya penguatan *sustainable finance* di industri perasuransian.
- Dalam proses finalisasi ketentuan di industri PVML meliputi RPOJK Pergadaian, RPOJK Koperasi di Sektor Jasa Keuangan, dan RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.
- Dalam proses finalisasi RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
- Akan membangun *Anti Scam Center* (ASC)/ *cyber patrol* bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar dapat meminimalisir kerugian masyarakat/konsumen dengan percepatan proses blokir rekening yang diduga terkait tindak pidana.
- Menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers* Bagi Para Guru SD/MI Secara Nasional bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Menyelenggarakan acara "Sosialisasi Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT)" di Jambi.
- Mengembangkan *website* OJK yang *user friendly* dan ramah bagi kaum difabel serta aplikasi *mobile* Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang memudahkan akses bagi konsumen dan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik.
- Sinergi OJK dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman tersebut meliputi percepatan peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan reformasi sektor jasa keuangan yang dapat mewujudkan pendalaman dan pengembangan sektor keuangan agar dapat kompetitif dalam skala global dan menunjang kebutuhan sektor riil domestik.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah dan Pedoman Kerja Sama *Channeling* antara BPRS dengan *Fintech P2P Financing*.
- Menyelenggarakan *training of trainers* (TOT) PPDP Syariah di Provinsi Lampung sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah terutama pada bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.



Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)

- Menerima dan melakukan proses pendaftaran bagi calon Penyelenggara Lembaga Alternatif Pemeringkat Kredit (*Innovative Credit Scoring*) dan Penyelenggara Model Bisnis Agregasi Informasi Produk dan Layanan Jasa Keuangan yang telah mendapat penetapan lulus *Sandbox*.
- Dalam tahap penyusunan beberapa ketentuan meliputi RPOJK mengenai Lembaga Alternatif Pemeringkat Kredit, RSEOJK mengenai Pelaporan Penyelenggaraan ITSK, RSEOJK mengenai Asosiasi Penyelenggara ITSK, RPOJK mengenai model bisnis *Aggregator*, dan *Cybersecurity Guideline* untuk industri ITSK.
- Akan mengembangkan ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui Pusat Inovasi dengan prinsip *Penta Helix Innovation Hub* yang melibatkan pemangku kepentingan.
- Meluncurkan Panduan Strategi *Anti-Fraud* Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memitigasi praktik *fraud* dan membangun kepercayaan masyarakat bekerjasama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI).
- Membentuk Tim Transisi peralihan tugas terkait kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada OJK



Penguatan Tata Kelola

- Mendorong optimalisasi penggunaan teknologi data *analytics* dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam profesi internal audit.
- Secara berkala mendorong peran aktif auditor internal sebagai *3rd line of defense* organisasi dan mendukung agar standar internal audit terus diperbarui untuk memastikan keselarasan dengan standar yang berlaku secara internasional seperti *Global Internal Audit Standards* (GIAS).
- Memperkuat pengawasan internal terhadap penerapan program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan melalui implementasi fungsi khusus pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan program APU-PPT di sektor jasa keuangan.
- Menyelenggarakan forum diskusi Hari Kartini 2024 bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong para pegawai OJK dan keluarga agar terus memperkuat integritas dan sikap anti-korupsi.



Perkembangan Penyidikan

Sampai Dengan 30 Mei 2024,

- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 123 perkara yang terdiri dari 98 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB.
- 105 perkara telah diputus oleh pengadilan (99 perkara *in kracht* dan 6 perkara tahap kasasi)



Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan berkontributif

